Memahami “Cultural Studies” dan Multikulturalisme dari Perspektif Pascamodern

Akhyar Yusuf Lubis

ABSTRACT *Cultural studies is a study of culture, the paradigm of which is quite different from that of the conventional (i.e. modern) studies. If we accept this view, it means that the whole problem of cultural reality, epistemology, and methodology cannot be used to understand and investigate cultural studies and multiculturalism. The infeasibility of using conventional study of culture to apprehend cultural studies and multiculturalism is related with the principle of incommensurability between those two fields, so there are different worldviews and rules (language games) between the two. This difference is vividly showed in character and model of study that conceives culture as homogeneity, single identity, patterned values, fragmented. Cultural studies and multiculturalism conceive culture as plurality, complexity, constructed identity, dynamics, diversity, interaction, and something porous. In light of this worldview, cultural studies, multiculturalism, and globalism, according to my analysis, must be understood and studied from postmodern perspective or paradigm.*

KATA KUNCI *Cultural studies, multikulturalisme, teori kritis, pascastrukturalisme (poststructuralism), pascamodernisme (postmodernism).*

Tulisan ini dengan jelas mengaitkan antara *cultural studies*, multikultural(isme), dan pascamodern(isme). Dalam pemikiran saya *cultural studies* dan multikultural(isme) hanya mungkin dipahami dengan tepat jika kita memahami konsep dan pemikiran pascamodernis. Oleh karena itu, berbagai penjelasan yang secara sederhana menyamakan *cultural studies* dengan kajian budaya tradisional (maksudnya modern) dan menyamakan pluralisme dengan multikulturalisme, menurut saya, adalah pendapat yang tidak tepat. Boleh dikatakan bahwa *cultural studies*, multikultural(isme), bahkan juga kajian feminis, dan teori pascakolonial secara epistemologis dipengaruhi oleh pemikiran kaum pascapositivis (seperti Kuhn, Feyerabend, Mazhab Frankfurt) serta kaum pascamodernis (seperti Francois Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault, Richard Rorty, Fredrich Jameson, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Antonia Gramsci, dan Gilles Deleuze) sehingga diperlukan pemahaman yang memadai tentang berbagai

pemikiran mereka untuk memasuki kajian *cultural studies* dan kajian multikultural(isme).

Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka yang mencoba membuktikan atau menunjukkan bahwa pemikiran pascapositivis, teori kritis, dan pascamodernis telah mempengaruhi dan memberikan dasar epistemologis bagi *cultural studies* dan kajian multikultural(isme), seperti budaya media massa, iklan, televisi, majalah, cara berpakaian, dan budaya kelompok terpinggirkan. Para pemikir juga memberikan dasar kajian pada ilmu sosial-budaya kritis yang bertujuan untuk menyingkap ideologi, dominasi, hegemoni, kuasa, dan kepentingan yang ada di dalamnya. Ketika kita dihadapkan pada berbagai masalah teoretis dan praksis budaya kontemporer ini, upaya untuk memahami persoalan budaya itu semakin mendesak. Pertimbangan serta keinginan untuk memahami berbagai masalah di sekitar *cultural studies* dan kajian multikultural itu diberikan. Kajian ini, sekarang berkembang luar biasa, yang mungkin terkait dengan merambat cepatnya budaya pascaindustri dan abad informasi yang memungkinkan saling pengaruh antarbudaya. Tester (2003: 6) secara tegas menghubungkan *cultural studies* dengan revolusi informasi. Ia menyebutkan *cultural studies* dan kajian multikultural sebagai "anak haram" (*bastard child*) media dan revolusi informasi yang mulai menjadi unsur budaya yang paling berperan sekarang ini.

"CULTURAL STUDIES" SEBAGAI KAJIAN LINTAS DISIPLIN

Istilah *kebudayaan*, yang dalam bahasa Inggris *culture*, secara umum memiliki dua pengertian berbeda. *Pertama* adalah pengertian kebudayaan sebagai *belles letters*, yang membedakan antara kebudayaan tinggi dengan kebudayaan rendah (populer, massa). *Kedua* adalah kebudayaan yang diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan khusus, adat-istiadat, dan pandangan dunia satu komunitas manusia. Konsep kebudayaan yang kedua lebih cocok dengan tema pembahasan ini, yaitu *kebudayaan* selalu diklasifikasikan sepanjang garis-garis geopolitik, kontinen, dan bangsa tertentu. Istilah *culture* menurunkan istilah *culturalism* (*kulturalisme*), *multikulturalisme*, dan lain-lain. Istilah *kulturalisme* muncul dalam karya Hoggart, Williams, Thompson, dan Hall pada akhir tahun 1950 – 1960-an sebagai konsep untuk *cultural studies*.

Cultural studies tahap awal mulai tumbuh di Inggris melalui buku *The Use of Literacy* (1958) karya Hoggart; *Culture and Society* (1966) karya Williams, dan *The Making of the English Working Class* (1978) karya Thomson. Hoggart adalah dosen sastra Inggris di Universitas Birmingham dan pendiri *Centre for Contemporary Cultural Studies*. Mereka mencoba mempertahankan kebudayaan kelas pekerja di Inggris dan Eropa dari serangan budaya massa yang diproduksi oleh industri-industri budaya seperti yang terjadi di Amerika. Hoggart melakukan penelusuran historis atas institusi dan perjuangan kelas pekerja Inggris (1963). Hoggart dan Williams melakukan pembelaan terhadap budaya dan pendidikan kelas pekerja serta

perlawanan mereka terhadap budaya massa. Hal itu dapat dilihat sebagai proyek sosialis dan kelas pekerja yang menganggap bahwa kelas pekerja industrial sebagai satu kekuatan perubahan sosial progresif yang dapat dimobilisasi dan diorganisasi untuk berjuang melawan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat kapitalis (Kellner 2003:212). Hoggart dan Williams, yang terlibat banyak dalam pendidikan kelas pekerja dan politik kelas pekerja sosialis, melihat bahwa bentuk *cultural studies* mereka adalah instrumen perubahan sosial yang progresif. Kritik yang dilakukan Hoggart dan William terhadap Amerikanisasi dan kebudayaan massa sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Mazhab Frankfurt, yaitu bahwa ilmu pengetahuan dapat berfungsi sebagai pencerahan dan emansipatoris.

Williams dan Hoggart melihat tugas mereka sebagai pendukung budaya orang-orang biasa (awam) menghadapi budaya tinggi (elitisme) kelas menengah dan atas. Mereka menaruh perhatian pada masalah apa yang orang-orang lakukan dengan komoditas kebudayaan yang mereka temui dalam kehidupan keseharian mereka (Sardar dan van Loon 2002: 26). Dengan demikian, fokus perhatian mereka adalah bagaimana budaya dipraktekkan dan diciptakan atau bagaimana praktek budaya memungkinkan berbagai budaya dan kelas berjuang demi dominasi kebudayaan. Kelas adalah sesuatu yang terjadi dalam hubungan antarmanusia. Karena itu, kelas merupakan formasi sosial dan kultural yang hanya dapat dipelajari dalam proses dalam pembentukan dirinya dalam satu periode sejarah tertentu. Stuart Hall, seorang sosiolog dan kritikus, adalah tokoh kiri baru dan tokoh *cultural studies* yang menganjurkan keterpaduan analisis teoritis dan politis dalam *cultural studies*. Selama dalam proses pembentukan *cultural studies* di Inggris, gerakan *new left* (yang berkembang sebagai reaksi atas invasi Rusia atas Hongaria tahun 1956) dianggap sebagai perintis jalan bagi *cultural studies*. Pembantaian yang dilakukan Stalin menimbulkan kritik tajam dari kalangan intelektual dan mahasiswa terhadap Marxisme dan Stalinis. Gerakan mahasiswa (kaum intelektual) ini berperan dalam membangkitkan lahirnya *cultural studies* di Inggris.

Dalam pengertian luas, konsep yang dikembangkan oleh para ahli atau ilmuwan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kajian budaya populer (*cultural studies*) yang mulai berbeda dengan tradisi kajian "budaya dan peradaban" sebelumnya yang saya sebut sebagai kajian budaya konvensional (modern). Hall dan Whannel, dalam buku mereka *The Popular Arts*, melakukan kajian budaya populer, hal yang sama kemudian dilakukan pula oleh Pusat Studi Budaya Kontemporer di Universitas Birmingham. Perkembangan tahap kedua *cultural studies* Inggris ditandai dengan berdirinya *Center for Contemporary Cultural Studies* di Universitas Birmingham pada tahun 1970-an oleh Hoggart dan Hall. Menurut Kellner (2003: 214), pendukung pusat studi itu memiliki banyak persamaan dengan gerakan dan pemikiran Mazhab Frankfurt. Pusat *cultural studies* itu mengembangkan beragam pendekatan kritis untuk analisis interpretasi dan kritik terhadap artefak kebudayaan.

Pada tahun 1970–1980-an fokus perhatian kelompok Birmingham melebar pada representasi gender, ideologi kelas, ras, etnisitas, dan nasionalitas dalam teks kebudayaan, pendidikan, termasuk kebudayaan media. Dalam menganalisis media, mereka memperhatikan bagaimana keragaman audiens dalam penafsiran dengan menggunakan budaya media dalam berbagai cara dan konteks, dan juga dalam analisis faktor-faktor yang membuat audiens merespon dengan berbagai cara berbeda terhadap wacana media. Tradisi Mazhab Frankfurt, termasuk pengaruh Antonio Gramsci dan Louis Althusser, memadukan persilangan budaya dengan ideologi dan melihat ideologi sebagai suatu hal yang penting dalam *cultural studies*. Mereka menyimpulkan bahwa kebudayaan massa memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kelas buruh dalam masyarakat kapitalis. Kebudayaan konsumen dan media baru sedang menyusun model hegemoni kapitalis baru.

Cultural studies Inggris, di samping memperhatikan subkultur dengan berbagai identitasnya, kultur kelas pekerja, kultur generasi muda yang dianggap potensial melawan atau oposisi terhadap bentuk hegemonik dominasi kapitalis atau neokapitalis, juga mengkaji perilaku kelompok tertentu, seperti penyanyi *rock*, model, gaya pakaian, rambut, musik dan ritual pesta, yang dianggap sebagai perlawanan simbolis terhadap kelompok yang dominan. Muncul pula perhatian pada studi subkultur, masalah wanita, gender, maskulinitas, seksualitas serta masalah wanita kulit hitam yang terbelah secara sosial akibat perbedaan kelas. Dengan demikian, fokus *cultural studies* berkembang begitu luas dengan berupaya membongkar politik, ideologi yang ada serta konstruksi sosial ilmu pengetahuan. Ideologi, menurut Althusser (1918–1990), adalah kerangka konseptual yang melaluinya kita menafsirkan dan memahami kondisi material kehidupan kita. Oleh karena itu, ideologi memproduksi budaya serta kesadaran kita tentang siapa dan apa diri kita (Sardar 2002: 46). *Cultural studies* Inggris juga banyak dikritik, disebut terlalu Eurosentris dan Anglosentris, misalnya dengan menganggap bahwa kebudayaan populer Inggris sebagai prototipe yang perlu diikuti dunia, sementara itu *cultural studies* Inggris kurang memperhatikan masyarakat pinggiran dan masalah wanita.

Pada tahun 1980-an *cultural studies* berkembang di Amerika Serikat sebagai satu bentuk yang kurang diwarnai marxisme kritis, sebagai akibat runtuhnya marxisme sebagai narasi besar seperti yang dikemukakan Lyotard. Sementara itu, *cultural studies* di Australia mendapat pengaruh besar dari Inggris, namun lebih memfokuskan bahasannya pada masalah Australia. Di Prancis masalah gender, kelas, ras, dan masalah keprancisian menjadi perhatian besar. Pierre Bourdieu salah seorang tokoh *cultural studies* Prancis terkemuka mengemukakan istilah *cultural capital* atau modal budaya sebagai hal yang diperlukan untuk membaca dan memahami kode budaya. Akan tetapi, tentu saja modal ini tidak terdistribusi dan dimiliki semua orang secara sama di antara kelas-kelas sosial. Kelas pekerja memiliki sedikit “modal budaya” dan secara sistematis tersingkir dalam pertempuran memperebutkan modal budaya tersebut.

Di Asia Selatan, khususnya India, *cultural studies* berkembang dengan sangat pesat, seperti yang dilakukan sekelompok ilmuwan (R.S Rajan, Geeta Kumar, dan Aijazmad) pada *Centre of Contemporary Studies* di *Nehru Memorial Museum and Library*. Mereka melakukan penelitian tentang film, tarian, budaya jalanan, dan dominasi global. Studi tentang budaya subaltern — kelompok yang didominasi dan dieksploitasi — dilakukan oleh kelompok dari Universitas Delhi dengan jurnal ilmiah *Subaltern Studies: Writings on South Asia History and Society* yang terbit pertama kali tahun 1982. Para tokoh dalam kajian subaltern ini antara lain Ranajid Guha, Shahid Amin, Gyanendra Pandey, Sumit Sarkar, dan, yang paling terkenal, Gayatri Chakravorty Spivak. Seperti gerakan revolusi hijau, *cultural studies* India dipengaruhi oleh Gandhi.

Studi subaltern dilakukan oleh kelompok universitas New Delhi di *Centre of Contemporary Studies* di *Nehru Memorial Museum and Library*. Nandi (1937-...) adalah psikolog dan kritikus budaya yang disebut sebagai *Bapak Cultural Studies India*, yang menjadikan *cultural studies* India sebagai khas pribumi. Ia menempatkan diri sebagai korban tirani sejarah dan korban penindasan ide-ide besar Barat seperti sains, rasionalitas, pembangunan, dan negara-bangsa. Nandi berusaha untuk menyatukan korban-korban tersebut sekaligus menyadarkan mereka bahwa mereka sebagai korban penindasan Barat. Studi budaya adalah studi mengenai cara-cara dan sarana yang digunakan media massa dan budaya impor Amerika “untuk menguasai” kelas pekerja. Sementara itu, tugas *cultural studies* adalah analisis mengenai tujuan dan pertimbangan nilai. *Cultural studies* adalah bidang ilmiah yang sekarang ini menjadi kajian yang sangat menarik, progresif, sangat luas, dan populer, banyak dibicarakan di kalangan akademisi, sehingga cenderung menerobos bidang-bidang filsafat, antropologi, psikologi, teori sastra, sosial, politik, seni, humaniora, bisnis, manajemen, bahkan bidang sains dan teknologi (Sardar dan Borin van Loon 2001: 3).

Kajian yang luas ini sebenarnya sejalan dengan definisi budaya yang begitu luas, seperti yang didefinisikan William (1921 – 1988), “budaya mencakup organisasi produksi, struktur keluarga, struktur lembaga yang mengekspresikan atau mengatur hubungan sosial, bentuk-bentuk berkomunikasi khas anggota masyarakat” (Sardar dan van Loon 2001: 5). Dalam *cultural studies* seakan-akan tidak ada batas-batas objek kajian yang jelas dapat dikemukakan antarberbagai bidang ilmiah yang telah dikemukakan itu. *Cultural studies* dengan leluasa bergerak dari satu teori ke teori lainnya, dari satu metodologi ke metodologi lain, dari satu disiplin ilmiah ke disiplin lainnya. *Cultural studies* mengambil apa saja yang dibutuhkan dari bidang-bidang ilmu lain, lalu mengadopsinya untuk disesuaikan dengan tujuannya, tanpa mengikuti aturan keilmiah konvensional, sehingga disebut antidisiplin (Sardar dan Van Loon 2001: 8).

Cultural studies “melakukan” hal yang oleh sebagian besar ahli tidak mungkin atau bahkan dilarang (tabu) bagi aturan-aturan ilmiah

konvensional. Karena itu *cultural studies* bukan disiplin ilmiah, tetapi lebih merupakan upaya kolektif intelektual yang sungguh-sungguh dalam menggeluti banyak persoalan dari berbagai sudut pandang atau perspektif teoretis, politis, dan kepentingan yang berbeda tentang budaya dalam arti yang luas. Di lingkungan universitas *cultural studies*, sebagaimana yang dilakukan oleh mazhab Frankfurt, menjadi kajian transdisipliner atau interdisipliner untuk mengkaji persilangan antara kebudayaan, masyarakat, dan politik serta mengkritik fragmentasi akademik dan pendisiplinan yang sudah mapan.

TEORI KRITIS DAN KARAKTERISTIK "CULTURAL STUDIES"

Di awal dikatakan bahwa *cultural studies* sulit didefinisikan, namun beberapa karakteristik *cultural studies* dapat dikemukakan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, *cultural studies* bertujuan meneliti atau mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dimensi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan (sosial-politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum dan lain-lain—bandingkan dengan konsep kuasa dan pengetahuan, kuasa dan kebenaran pada Foucault, kuasa dan kepentingan pada Habermas).

Kedua, *Cultural studies* tidak membahas kebudayaan yang terlepas dari konteks sosial-politik, tetapi mengkaji masalah budaya dalam konteks sosial-politik yang di dalamnya masalah kebudayaan itu tumbuh dan berkembang.

Ketiga, dalam *cultural studies*, budaya dikaji baik dari aspek objek maupun lokasi tindakan selalu dalam tradisi kritis. Maksudnya, kajian itu tidak hanya bertujuan merumuskan teori (intelektual), tetapi juga sebagai suatu tindakan (praksis) yang bersifat emansipatoris—bandingkan dengan teori kritis Mazhab Frankfurt.

Keempat, *Cultural studies* berupaya mendekonstruksi (membongkar, mendobrak) aturan-aturan, dan pengotak-ngotakan ilmiah-konvensional, lalu berupaya mendamaikan pengetahuan yang objektif, subjektif (intuitif), universal-lokal. *Cultural studies* tidak hanya memberikan penghargaan pada identitas bersama (yang plural), kepentingan bersama, tetapi mengakui keterkaitan dimensi subjek(tivitas) dan objektiv(itas) dalam penelitian.

Kelima, *cultural studies* tidak harus steril dari nilai-nilai (tidak bebas nilai), tetapi melibatkan diri dengan nilai dan pertimbangan moral masyarakat modern serta tindakan politik dan konstruksi sosial. Dengan demikian, *cultural studies* tidak hanya bertujuan memahami realitas masyarakat atau budaya, tetapi juga mengubah struktur dominasi, struktur sosial-budaya yang menindas, khususnya dalam masyarakat kapitalis-industrial (Sardar dan Van Loon 2001: 9).

Dalam pandangan *cultural studies* bahasa, cara berpakaian, makanan dan apa yang dimakan, cara bersosialisasi dan berkomunikasi adalah

budaya dan dapat dianggap sebagai teks yang dapat ditafsirkan. Roland Barthes mengembangkan kajian semiotik terhadap budaya. Untuk memahami aspek budaya melalui semiotik, maka budaya dilihat sebagai tanda. Bukan hanya sebagai upaya intelektual, tetapi juga upaya pragmatis. Kajian ini lebih menekankan penelitian yang sifatnya lokal, etnis, dan subkultur. Hal inilah yang membuat *cultural studies* menjadi berbeda jauh dengan kajian budaya konvensional dan lebih mengikuti jalan pemikiran pascapositivisme dan pascamodernisme. Pengaitan pascamodernisme dan multikulturalisme dengan *cultural studies* jelas sekali menunjukkan bahwa *cultural studies* tidaklah sama dengan kajian atau analisis budaya dalam pandangan tradisional (modern). Meskipun sama-sama membicarakan budaya, ada perbedaan mendasar tentang cakupan permasalahan yang dibicarakan serta latar belakang pemikiran dan budaya yang mendasarinya.

Williams, dalam *The Long Revolution*, mengemukakan adanya tiga kategori umum budaya:

Pertama, "kategori ideal", yang di dalamnya budaya sebagai suatu keadaan atau proses penyempurnaan diri manusia, berkaitan dengan nilai-nilai absolut atau nilai universal tertentu. Berdasarkan definisi itu, kajian budaya mengacu pada upaya menemukan dan mendeskripsikan kehidupan serta berbagai karya tentang nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menyusun aturan yang tetap (ahistoris) dan dapat digunakan. Karena itu, ada aturan permanen bagi kondisi manusia universal yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami kebudayaan di mana saja.

Kedua, budaya merupakan "catatan dokumenter" atau teks dan praktek budaya. Dalam definisi ini budaya adalah suatu kerangka intelektual imajinatif, yang dengan cara yang rinci, pengalaman serta pemikiran manusia dicatat (Storey 2003: 76). Tujuan kajian budaya berdasarkan definisi ini adalah memberi penilaian kritis.

Ketiga, definisi "sosial" tentang budaya membuat budaya dilihat sebagai gambaran pandangan hidup tertentu. Ciri kajian atau analisis budaya ketiga tersebut sangat penting bagi kajian budaya konvensional.

Secara umum, Williams mengemukakan bahwa kajian budaya bertujuan untuk "menyusun struktur perasaan". Struktur perasaan yang dimaksudkan William adalah nilai-nilai yang dianut oleh kelompok, kelas, atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, nilai itu menjadi semacam *habitus* (kebiasaan), menurut Bourdieu. *Habitus* adalah 'struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial-budaya', sebagai serangkaian skema atau pola yang diinternalisasi yang digunakan anggota masyarakat untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Pola-pola itulah yang menentukan tingkah laku, tindakan, serta kerangka untuk tindakan mereka. *Habitus* adalah konstruksi dunia sosial, struktur sosial yang diinternalisasikan dan diwujudkan (Ritzer 2004: 253). *Habitus* mencerminkan posisi sosial dalam kehidupan, mencerminkan kebiasaan yang terdapat pada kelas atau

kelompok sosial. *Kelas* diartikan Thomson sebagai 'suatu formasi sosial dan budaya yang terjadi dari berbagai proses yang dapat dipelajari yang dijalankan dalam suatu periode historis' (Storey 2003: 83).

Ahli *cultural studies* sering tertarik melakukan penelitian tentang masalah budaya populer yang pada masa modern dianggap sebagai budaya rendah yang berada di luar wilayah kajiannya. *Cultural studies* mencoba mendekonstruksi pandangan lama dan mengangkat budaya yang terpinggirkan itu pada tingkat yang wajar. Sampai tahun 1960-an, kecenderungan untuk menganggap rendah budaya pop masih sangat kuat, baik di Eropa maupun di Amerika. Contohnya dapat ditemukan dalam buku *Mass Culture: The Popular Arts in Amerika* (1957) yang dieditori Bernard Rosenberg dan David Manning White. Rosenberg menyatakan bahwa kekayaan material dan kesejahteraan rakyat Amerika ditopang oleh pengaruh dehumanisasi budaya massa dengan dampaknya yang paling terbesar, menurutnya, adalah, "paling jelek budaya massa mengancam tidak hanya mengerdilkan selera kita, tetapi membuat brutal perasaan kita dan membuka jalan menuju totalitarisme" (Storey 2003 : 50).

Terlihat secara jelas sikap dan penilaian negatif dan apriori terhadap budaya massa dari Rosenberg dan White. Karena itu, sangat wajar apabila Mazhab Frankfurt menekankan kesadaran ideologi, kebudayaan, dan sosialisasi dengan menekankan keutamaan transformasi individu dan masyarakat melalui perubahan kesadaran, perubahan budaya, dan institusi kehidupan sehari-hari, seperti dunia pendidikan. Mazhab Frankfurt memperkenalkan studi-studi kritis dan transdisipliner terhadap kajian kebudayaan dan komunikasi yang menggabungkan analisis kritis terhadap ekonomi, politik media, analisis teks, dan studi resepsi pembaca terhadap efek sosial dan ideologis dan kebudayaan dan komunikasi massa. Horkheimer dan Adorno, dua tokoh Mazhab Frankfurt tahun 1947, mengemukakan istilah *industri kebudayaan* untuk menandai proses industrialisasi kebudayaan yang diproduksi secara massal yang didorong oleh urgensi komersial. Industri kebudayaan memiliki fungsi melegitimasi ideologi masyarakat kapitalis yang ada dan mengintegrasikan individu ke dalam kerangka kerja formasi sosial. Penelitian yang dilakukan tokoh mazhab Frankfurt seperti Adorno terhadap musik populer (1941, 1978) dan studi Lowenthal terhadap sastra dan majalah pop (1961) menciptakan model awal bagi penelitian *cultural studies* (Kellner 1995: 207).

Pandangan yang merendahkan budaya populer dan upaya untuk mengangkat budaya populer itu ke tataran ilmiah telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Mazhab Frankfurt, kecuali Marcuse dan Adorno yang masih merendahkan budaya populer dengan alasan budaya ini bukan seni elit. Pengertian budaya dan kelas populer berkaitan erat dengan politik dan budaya dengan pengertian populer yang pada umumnya merujuk pada rakyat atau massa. Bennet (1980: 25) mengatakan tidak ada budaya populer (yang dapat dilihat begitu saja) karena budaya populer bukan "*a thing*" ('sesuatu'), tetapi merupakan lingkup atau dunia kehidupan makna,

praktik, dan hubungan intersubjektif yang tidak mungkin menjadi objek yang permanen.

Walter Benyamin adalah salah seorang tokoh Mazhab Frankfurt yang mengangkat budaya populer dengan mengemukakan konsep dan/atau teori "industri budaya" (1969) sebagai reproduksi mekanis budaya yang menurutnya tersebar atau diseberluaskan melalui media cetak dan elektronik. Benyamin tidak sependapat dengan teman-temannya, seperti Adorno, yang menganggap bahwa seni populer dianggap kehilangan potensi emansipatorisnya (Agger 2003: 184). Adorno cenderung merendahkan seni populer (seni massa) yang disebut sebagai seni yang "kehilangan suara" atau seni yang "kehilangan aura", khususnya seni yang dipertunjukkan secara langsung (*live*) atau seni yang dinikmati sambil duduk-duduk di galeri karya yang orisinal.

Tony Bennet adalah seorang tokoh yang membudayakan *cultural studies* melalui universitas terbuka dan, melalui beberapa bukunya, ia mengemukakan bahwa *cultural studies* menaruh perhatian terhadap berbagai masalah dan sama sekali tidak tinggal diam terhadap yang lain. Dengan demikian, *cultural studies* bukan kajian atau disiplin yang mengisolasi diri. Ia mendefinisikan budaya (*culture*) sebagai upaya untuk membedakannya dengan *cultural studies*. *Cultural studies* merupakan istilah yang dapat memayungi (*umbrella term*) berbagai kegiatan atau praktek yang menghasilkan pemahaman (*sense*) atau makna (*meaning*) kebudayaan (Bennet 1981:82). Definisi tentang *cultural studies* mencakup segala hal yang membuat hidup dan dunia kita menjadi dapat dipahami atau membuat segala sesuatu berbicara relatif diterima oleh kalangan ilmuwan, baik sosiolog, antropolog, maupun filsuf.

Meskipun ada keterkaitan dengan disiplin lain, Bennet membedakan *cultural studies* dengan kajian sosiologi, antropologi, dan filsafat dengan mengemukakan tentang perbedaan tentang objek yang ingin difahami. Sosiologi menurutnya lebih mengonsentrasikan diri pada masalah institusi dan struktur, antropologi pada praktik ritual, sementara filsafat berkonsentrasi pada kategori pikiran atau semangat zaman (*zeitgeist*). Bennett sendiri lebih tertarik pada pembahasan teks. Budaya adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Kajian teks memungkinkan dunia kehidupan sosial-budaya dapat kita pahami. Menurut Bennet, budaya secara fundamental membentuk dan menentukan kehidupan sosial kita.

Bennet kemudian mengemukakan bahwa *cultural studies* adalah kajian yang menekankan keterkaitan budaya dengan masalah hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Teks membantu kita memahami bahwa dunia diciptakan berdasarkan konvensi tertentu, yaitu kategori budaya populer. Dari sinilah terlihat bahwa pada akhirnya pertemuan antara *culture* yang dimaksudkan Bennet berujung pada budaya populer, sebagaimana narasi *cultural studies* pada umumnya. Budaya populer, menurut Bennet, bukan hanya budaya massa yang sesuai dengan kelas dominan dan bukan pula sekadar budaya tandingan (*counter culture*) yang dilakukan oleh kelas pekerja. Budaya pop merupakan tempat negosiasi dan gabungan darinya,

elemen dominan, subdominan, dan elemen tandingan yang bercampur baur dengan kombinasi yang berbeda-beda (Bennet 1981: 31).

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi menjadikan masalah sosio-kultural dan politik mendapat hak istimewa. Teknologi tanpa sadar sering terlibat dalam memproduksi mitos-mitos yang di dalamnya pola dominasi dan eksploitasi secara halus dan tersamar tetap diproduksi. Teknologi informasi menjadi unsur dominan dalam membentuk dan mempengaruhi masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan ketika banyak tokoh partai politik mempertanyakan kepentingan, ideologi, dan kuasa yang berada di balik hasil *pooling* pemilihan presiden yang sedang berjalan sekarang ini. Kiranya banyak benarnya jika dikatakan bahwa *pooling* telah menentukan dan mengarahkan pilihan rakyat secara signifikan dalam pemilihan presiden yang lalu. *Cultural studies* secara gencar memiliki perhatian untuk meneliti berbagai kepentingan, ideologi, dan hegemoni yang muncul dari informasi media massa. Contoh lain adalah informasi tentang globalisasi yang oleh media Barat sering dicitrakan sebagai pencipta surga demokrasi, padahal globalisasi dapat juga dianggap sebagai satu bentuk hegemoni dan dominasi negara maju, khususnya Amerika Serikat, terhadap negara miskin dan terbelakang.

Pemikiran Habermas tentang kaitan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan dijadikan dasar bagi kritik untuk mengungkap ideologi pada budaya pop dan media massa. Pemikir pascamodern justru meruntuhkan tembok pembatas antara apa yang disebut sebagai budaya tinggi dan budaya rendah. Susan Sontag dan Leslie Fiedler menyebut istilah ini dengan "sensibilitas" baru, sebuah pluralisme baru, serta pemberontakan kritis menentang normalisasi fungsi modernisme. Gramsci melalui bukunya, *Selections from the Prison Notebooks* (1971) dan *Selections from Political Writings* 1910–1920 (1977) juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemikiran strukturalisme dalam ilmu sosial, khususnya pada Althusser dan Poulantzas dan juga bagi *cultural studies*. Ia membedakan istilah *hegemony* dengan *force* (kekuatan). *Force* mengandalkan daya paksa untuk memaksa orang banyak untuk mengikuti dan memenuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, sedangkan hegemoni merupakan perluasan kekuasaan serta kepatuhan "aktif" kelompok yang didominasi oleh kelas yang berkuasa melalui penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik, yang terwujudkan oleh bentuk kooptasi kelembagaan dan manipulasi sistematis atas teks dan tafsirannya.

Konsep tentang hegemoni atau dominasi beberapa kelompok sosial atau kelas dalam masyarakat dan negara serta perhatian dalam membedakan antara negara dan masyarakat sipil telah mendorong munculnya berbagai interpretasi reformis dalam kajian sosial-budaya, termasuk *cultural studies*. Melalui konsep hegemoni, penguasa melakukan negosiasi dengan kelompok budaya tandingan menuju landasan budaya dan ideologi yang dapat membuatnya mendapatkan posisi kepemimpinan. Hegemoni adalah upaya bagaimana kelompok penguasa dapat menyubordinasi demi mempertahankan *status quo*. Masalah hegemoni, dominasi, subordinasi,

status quo, kelompok terpinggirkan, dan budaya pop menjadi konsep-konsep penting dalam memahami *cultural studies*.

Perhatian *cultural studies* mengenai budaya populer berkaitan dengan hal berikut:

Pertama, narasi *cultural studies* berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa bentuk-bentuk budaya tertentu berkembang dan diterima dalam hubungan sosial kontemporer.

Kedua, narasi *cultural studies* berusaha mengeksplorasi bagaimana hegemoni kelompok dominan, posisi, dan fungsinya dalam dunia produksi berkembang dan bergerak (Gramsci 1971: 12).

Ketiga, terdapat asumsi tentang betapa perlunya menyingkap bagaimana hubungan hegemoni yang baru dapat dipraktekkan pada masa yang akan datang dan bagaimana kelompok dan kelas subordinat dapat menjadi bagian dominan dan integral dari hegemoni yang baru.

Keempat, sebagai konsekuensi 3 butir di atas adalah, adanya kecenderungan *cultural studies* untuk memberikan perhatian pada persoalan politik praktis yang sering mengambil tindakan simpatik terhadap praktisi budaya yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk resistensi terhadap hubungan dominasi dan kepemimpinan yang ada.

"CULTURAL STUDIES" DAN KAJIAN SOSIAL-BUDAYA ILMIAH

Penelitian mengenai budaya ilmiah merupakan salah model atau kecenderungan yang menjadi fokus perhatian dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan sekitar tahun 1950–1960-an. Kajian yang di dalamnya diteliti keterkaitan ilmu pengetahuan dengan faktor sosial-budaya dan historis ini, menurut saya, dapat juga disebut sebagai bagian dari *cultural studies* dalam bidang ilmu pengetahuan. Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Mazhab Frankfurt, dan pascamodernis telah melakukan hal yang sama. Mazhab Frankfurt (teori kritis) dan pascamodernis tidak hanya sekadar memberi arah bagi *cultural studies* untuk mengkaji budaya massa atau budaya populer, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kepentingan dan kekuasaan. Keterkaitan ilmu pengetahuan dengan kepentingan dan kekuasaan oleh Habermas dijadikan sebagai fokus kajian sosial-budaya ilmiah—khususnya tradisi modern atau Pencerahan.

Kajian sosial-budaya ilmiah lebih menarik dan sensitif secara ideologis daripada kajian budaya lain. Bahkan, *cultural studies* lebih penting karena kajian ini langsung mendobrak totem dan ideologi ilmiah modern (positivisme) yang secara umum dijadikan kerangka berpikir para ilmuwan sejak Aguste Comte sampai pertengahan abad ke-20 (lihat Lubis 2003). Kajian sosial-historis terhadap ilmu pengetahuan ternyata mampu menyingkap ideologi hegemonis yang terkandung dalam ilmu pengetahuan sehingga wajah atau tubuh ilmu pengetahuan itu semakin jelas tidak murni, tidak objektif, serta tidak bebas dari nilai subjektif, nilai kepentingan, dan kuasa.

Pertarungan selama berabad-abad terjadi antara tokoh agamawan dan ilmuwan yang terjadi mulai masa Renaisans dan Pencerahan, yang kemudian dimenangkan oleh kaum ilmuwan. Kemenangan kaum ilmuwan pada akhirnya melahirkan saintisme di abad modern. Klaim kebenaran teori yang objektif-universal dan bebas bisa-nilai dan kepentingan yang diajukan para saintis telah menjadikan ilmu pengetahuan menjadi ideologi dan mitos baru. Klaim ilmu itu dijadikan sebagai dasar untuk menyingkirkan teologi dan metafisika oleh pendukung positivisme logis dengan menyatakan bahwa metafisika, teologi, dan nilai-nilai merupakan sesuatu yang tidak bermakna karena tidak didasarkan atas fakta dan tidak dapat dibuktikan secara empiris-kuantitatif. Klaim eksklusif ini seakan-akan mendapat pengukuhan (justifikasi) berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa pada masa modern. Klaim-klaim yang dijadikan dasar untuk menunjukkan keunggulan ilmu pengetahuan yang didasarkan atas metode empiris-eksperimental kemudian menemukan suasana baru dengan penyerangan oleh para ilmuwan dan filsuf pascapositivisme (Karl Raimund Popper, Thomas Samuel Kuhn, Paul Feyerabend, Jurgen Habermas), para pemikir pascamodern (Francois Lyotard, Michel Foucault, Richard Rorty), serta para pemikir konstruktivis (Bruno Latour, Steve Woolgar, Karin Knorr Cetina, Steve Fuller, Bas van Fraassen).

Ciri khas para pemikir tersebut adalah ketertarikan untuk melakukan analisis sosial, historis, dan antropologis terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, yang disebut juga sebagai kajian terhadap budaya sains. Apa yang dilakukan oleh pemikir pascapositivis, pascamodernis, dan konstruktivis seperti Latour, Woolgar, dan Cetina adalah melakukan penelitian, kemudian menyingkapkan keterkaitan model dan paradigma ilmiah dengan aspek sosial-historis (budaya). Max Weber dan Karl Mannheim adalah sosiolog Jerman terkemuka yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama dan mengemukakan keterkaitan pemikiran ilmiah dan penelitian ilmiah dengan perspektif dan budaya ilmiah. Sementara itu, Kuhn dan Polanyi mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari keyakinan dan asumsi ilmiah tertentu.

Seperti dikemukakan Mannheim, ada konsep-konsep, ada ideologi "khusus" dan "total", yang mempengaruhi interpretasi ilmuwan terhadap objek yang diteliti pada setiap paradigma, termasuk paradigma positivisme sekalipun. Ideologi dalam pengertian Mannheim tersusun atas berbagai kepercayaan dan asumsi tentang dunia yang diterima, namun tidak sepenuhnya teruji. Pandangan seseorang juga dibatasi oleh warisan pengetahuan, kepercayaan, dan posisi sosialnya. Pemikiran Mannheim dalam *Ideology and Utopia* sesungguhnya memiliki banyak kemiripan dengan pemikiran Kuhn, yang dengan konsep paradigmanya kemudian membuka perspektif dan kepercayaan bahwa sesungguhnya tidak ada penafsiran atau penjelasan ilmiah yang bebas dari pengaruh sosial-budaya.

Pengaruh Kuhn, Feyerabend, dan mazhab Frankfurt lebih berupa pendasaran epistemologis, yang menolak dominasi positivisme dan

dukungannya terhadap pluralisme metodologi. Kuhn mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan bersifat relatif dan arbitrer. Ilmu pengetahuan didasarkan atas paradigma yang mengandung nilai-nilai, mengandung asumsi-asumsi metafisika tertentu. Paul Feyerabend (1924–1994) mengemukakan bahwa selama masa modern ilmu pengetahuan telah menjadi musuh kebebasan karena tuntutan kesatuan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode ilmu-ilmu alam, termasuk pada ilmu sosial-budaya. Feyerabend menolak itu dengan mengemukakan bahwa metode apa pun boleh digunakan (Lubis 2003).

Analisis konteks sosial-budaya ilmu pengetahuan (kajian sosiologi ilmu pengetahuan) menimbulkan demistifikasi terhadap ilmu pengetahuan dan klaim-klaimnya. *Cultural studies* tentang dunia ilmu pengetahuan di dunia akademis melahirkan mata kuliah dan rubrik ilmiah dengan beragam nama seperti *sains, teknologi, dan masyarakat, studi kebijakan sains, dan studi sosial sains* (Sardar 2001: 96). *Cultural studies* tentang kajian sosiologis, antropologis, religiositas, dan budaya sains dalam ilmu pengetahuan ini berkembang melalui banyak ahli konstruktivis, seperti Bas Van Fraassen, Bruno Latour dan Steve Woolgar, Karin Knorr-Cetina, Steve Fuller, Andre Kuckle. Bruno Latour dan Steve Woolgar dalam *Laboratory Life* (1979) meneliti perilaku para peneliti di laboratorium dan mereka menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas di laboratorium ilmu pengetahuan, dipusatkan untuk menciptakan konstruksi sosial atas ilmu pengetahuan.

Michel Mensor dan Stanley Aronowitz dalam *Techno-Science and Cyber Culture* (1966) mengemukakan bahwa kesadaran tentang adanya hubungan yang mendalam antara teknologi dan budaya menyadarkan kita bahwa “teknologi tidak terpisah dari manusia”. *Cyborg* (1991) karya Donna Haraway adalah salah satu contoh kritik kaum feminis terhadap teknologi. *Cyborg* disebut mencoba menembus batas antara binatang dan manusia; teknologi pun menembus batas “realitas” dan “fiksi”. *Cyborg* sebagai organisme sibernetik merupakan peleburan antara biologi dengan teknologi. Sekarang organisme bukan lagi sekadar tubuh, tetapi berkembang menjadi komponen biotik. Teknokultur atau studi kebudayaan tentang teknologi dan bagaimana kemajuan teknologi telah mempengaruhi ruang-budaya kita secara mendalam (Sardar 2001: 102–104).

“CULTURAL STUDIES” DAN TEORI PENDIDIKAN KRITIS

Karya Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (1972), yang mengkritik konsep pendidikan bank, merupakan salah satu contoh hasil penerapan *cultural studies* dalam wilayah pendidikan. Pemikiran Freire itu berpengaruh sangat luas dalam dunia pendidikan dengan kemunculan tokoh-tokoh pedagogi kritis (Mc Laren, Hendry Giroux, Carlos Torres) pada tahun 1990-an. *Cultural studies* dalam dunia pendidikan secara kritis memperluas analisis kelas dengan memasuki konsep gender serta ras dan budaya dalam multikultural(isme). Hendry Giroux menggabungkan teori hegemoni Gramsci untuk menganalisis pendidikan kapitalis sebagai kekuatan korporasi dan

dominasi. Giroux mencoba memadukan *cultural studies* dengan pedagogi kritis atau radikal untuk merekonstruksi sekolah dengan perspektif kritis-transformatif dan kebudayaan yang lebih demokratis (Giroux 1993, 2000, 2001). Giroux merasa perlu mengangkat isu-isu pascamodern dalam kerangka teorinya, seperti konstruksi sosial dan representasi media tentang kaum muda, serta mengeksplorasi bagaimana kaum muda menjadi kambing hitam dari masalah masalah sosial-politik serta dikomodifikasi dan dieksploitasi oleh industri periklanan, konsumen, dan media (*Figutive Culture*, 1996). Giroux melakukan kajian pengaitan *cultural studies*, teori pendidikan, dan teori sosial-politik dalam upaya meningkatkan kesadaran dan memberdayakan generasi mendatang serta menghidupkan demokrasi dalam memasuki milenium baru.

Akibat pengaruh pascamodern, kira-kira pertengahan tahun 1980-an, *cultural studies* memasukkan problematika pascamodern yang disebut McGuigan sebagai "populisme kultural" pada bidang kajiannya: masalah kesenangan, konsumsi, konstruksi identitas individu atau hibrida, masalah lokal, *decentring*, dan lain-lain. Peralihan ini merupakan perubahan dari analisis Marxian ke pascamodern yang menekankan perbedaan, multiplitas, dan narasi kecil. Pengaruh pascamodern pada *cultural studies* itu juga diikuti dengan penekanan pada audiens yang aktif, pembaca yang kritis, dekonstruksi yang di dalamnya pembaca atau audiens harus aktif dan kritis dalam menghadapi pilihan media yang sangat luas pada era globalisme. Pascamodernisme dan globalisme dianggap telah melahirkan tatanan sosial baru yang didasarkan pada pengembangbiakan produk, hasrat, dan kebutuhan (seperti ekonomi libidinal).

Giroux mengkritik dengan sangat tajam iklan pakaian dari Benetton (*united colors*) tahun 1985 yang menurutnya menggunakan imaji harmoni rasial untuk menjual pakaian maupun pandangan mengenai kesatuan kultural yang menghapus perbedaan ras, kelas, gender, ketimpangan, penindasan, dan penderitaan. Melalui iklan tahun 1991 ini, Benetton memasukkan imaji mengenai AIDS, kemiskinan, perang, dan perusakan lingkungan dalam iklannya. Menurut Gioux, realisme sosial yang ditampilkan iklan digunakan sebagai "estetisasi penderitaan" dan menjual imaji perusahaan yang memiliki "tanggungjawab sosial" yang tinggi. Giroux mendekonstruksi imaji yang ditawarkan dengan mengungkapkan komitmen perusahaan pada proneoliberal, antipemerintah, dan permusuhan dengan koperasi dan menjadikannya sebagai pakaian atau pasar global. Giroux menyingkapkan bagaimana imaji-imaji digunakan sebagai alat untuk promosi dan ideologi. Ia menemukan ironi dalam analisis iklan Calvin Klein yang mengiklankan tubuh muda (Perry Meisel) yang berpose dalam pakaian seksual provokatif yang berimpitan dengan foto porno. Ironisnya, penjual pakaian kelas atas adalah wanita kelas bawah. Giroux mengemukakan ini sebagai proses berganda yang mengambinghitamkan kaum muda sekaligus mengobjektifikasi dan mengomodifikasi kaum muda untuk menjual produk. Tubuh muda menjadi tontonan dan objektifikasi. Daya pikat kaum muda dan gairah seksual

dipasarkan dan dikonsumsi oleh remaja-dewasa yang ingin menurutkan gaya narsisme (Kellner 2003: 233).

Media sangat penting bagi pendidikan dan untuk sebagian bahkan lebih penting daripada sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Menurut Giroux (2000: 4), korporasi budaya medialah yang membentuk budaya dan kehidupan sehari-hari kita. "Politik budaya" menurut Giroux menyediakan ruang konseptual tempat masa kanak-kanak dibentuk, dilatih, dan diperjuangkan". Neil Postman menyedihkan "pendewasaan" anak-anak, sementara Giroux menyerang eksploitasi anak-anak dan "fantasi kedewasaan" yang dipaksakan, yaitu kebutuhan budaya konsumen-komersial pada anak-anak melalui model gadis-gadis belia yang didewasakan.

Roland Barthes (1915–1980) dan Pierre Bourdieu (1930–2002) adalah dua tokoh pascamodernis (pascastrukturalis) dan *cultural studies* Prancis yang terkemuka dan mempengaruhi bidang sosiologi, antropologi, pendidikan, pendidikan, dan kajian media massa yang begitu luas mempengaruhi kajian tentang budaya dewasa ini. Roland Barthes umumnya dikenal sebagai seorang tokoh pascastrukturalis dan semiotik. Ia menggunakan metode semiotik untuk memahami budaya populer, olahraga (gulat), pakaian, makanan, dan tarian (*strip-tease*) untuk mengetahui nilai-nilai atau pesan yang terkandung dalam berbagai unsur budaya tersebut. Barthes menamakan citra atau "pesan" yang terkandung dalam tarian, olahraga, dan makanan itu dengan mitos. Mitos bagi Barthes merupakan jenis tuturan, suatu sistem komunikasi yang menyampaikan pesan (*message*). Semua bentuk tuturan atau wacana dapat disebut sebagai mitos sejauh ia disampaikan dalam bentuk wacana atau diskursus (Barthes 1972: 109).

Istilah *pohon*, *ibu*, dan *perempuan* dalam wacana gerakan pelestarian lingkungan dan feminis tidak mengacu pada pohon, ibu, dan perempuan seperti dalam pengertian awam. Istilah *pohon* mengandung arti yang sangat luas, sakral, serta kesan tertentu (kehidupan, keselamatan, keindahan), sedangkan *ibu* dan *perempuan* juga mengandung makna yang dalam (yang melahirkan, memiliki kasih sayang, menjaga, dan memelihara kehidupan). Dengan demikian, ada makna dan citra sosial tertentu yang terkandung di dalamnya. Barthes menggunakan makna konotatif ini pada penelitiannya. Jika selama ini gulat hanya dianggap sebagai olahraga, bagi Barthes olahraga (gulat) bukan sekadar olahraga, tetapi sebuah pertunjukan, sementara *strip-tease* adalah deseksualisasi perempuan. Ada pesan yang tersembunyi dalam gulat dan tari yang natural. Misalnya, dalam gulat tidak hanya dinilai kekuatan fisik, tetapi, lebih jauh lagi, merupakan sebagai peperangan antara yang "baik" dengan "yang jahat". Pada tingkat pertama ada pesan "olahraga", namun di baliknya ada pesan atau konflik antara "yang baik" dengan "yang jahat". Dengan demikian, pesan sesungguhnya bukan lagi estetika, tetapi ideologi (Barthes 1972).

Bourdieu, sosiolog Prancis yang terkemuka dan seorang pascamodernis (konstruktivis), telah menghasilkan karya teoretis dan penelitian empiris dalam bidang sosiologi, filsafat antropologi, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Pendekatannya sangat inovatif dengan model pendekatan kajian transdidipliner sehingga menempatkannya sebagai salah seorang ahli *cultural studies* Prancis terkemuka. Secara kreatif ia menggabungkan konsep sosiologi, linguistik, filsafat dari beberapa pemikir, seperti Bachelard, Weber, Marx, Mauss, dan Durkheim, hingga menjadi proyek intelektual yang kreatif dan produktif (Boudieu 1990). Bourdieu menyebut pendekatannya sebagai sosiologi reflektif untuk menunjukkan bahwa teorinya tidak hanya merefleksikan masyarakat, tetapi juga status objek(tif) dan subjek(tif) dalam suatu kerangka diskursif dan sosial (Palmer 2003: 408). Teori sosial Bourdieu mengatasi sterilitas oposisi antara subjek(tivisme) dan objektivis(me).

Sosiologi reflektif Pierre Bourdieu menawarkan sebuah pendekatan untuk memahami praktek intelektual pada sosiologi, ilmu alam, dan pendidikan. Sasaran reflektivitas epistemik bagi peneliti, menurut Bourdieu, adalah untuk menggali "ketidaksadaran epistemologis dari disiplin ilmunya" masing-masing. Sasaran utamanya adalah, *pertama*, untuk menggali ketidaksadaran intelektual dan sosial yang tertanam dalam perangkat dan cara kerja analitik dan, *kedua*, merupakan tindakan kolektif alih-alih tanggung jawab individual. Reflektivitas bukan untuk memperlemah, melainkan untuk memperkuat epistemologi suatu disiplin ilmu. (Bourdieu dan Wacquant 1992: 41).

Bourdieu membedakan individu epistemik dengan individu biologis. Individu epistemik adalah epistemik yang dikonstruksi atau dibentuk oleh kehidupan yang dibawa seseorang. Ia juga mengemukakan kemungkinan menyusupnya ideologi tanpa disadari pada dunia ilmiah tanpa disadari para ilmuwan. Pengaruh mazhab Frankfurt terhadap *cultural studies* dan multikulturalisme sangat jelas dan tidak dapat diabaikan. Pengaruh itu berkaitan dengan permasalahan asumsi-asumsi dasar (ontologi dan epistemologi) yang mendasari *cultural studies* dan multikulturalisme itu. Jika paradigma positivisme dan saintisme membawa manusia dan cara pandang yang berdimensi satu, yaitu cara berpikir operasional (*one dimensional man*), sebagaimana dikemukakan Herbert Marcuse, pascamodernisme membawa perpektif plural yang lebih sesuai dengan budaya plural dan multikultural yang kita hadapi sekarang ini.

Dalam dunia pendidikan muncul pemikir yang disebut *pedagogi kritis*'. Pedagogi kritis adalah teori pendidikan yang menggabungkan dimensi pedagogi (pendidikan) ke dalam *cultural studies*. Paulo Freire, dengan *The Pedagogy of the Oppressed* (1972), adalah tokoh pendidikan kritis yang banyak mempengaruhi pendidikan tahun 1980-an. Pengaruh Freire terlihat pada beberapa tokoh pendidikan kritis, seperti Hendry Giroux, Marcedo, Carlos Torres, dan Peter McLaren yang mengembangkan teori kritis dalam pendidikan tahun 1990-an hingga sekarang. Henry Giroux memanfaatkan *cultural studies* untuk pendidikan kritis dan berusaha menggabungkan

pendidikan kritis dengan *cultural studies*, yaitu dengan mengembangkan dimensi budaya dan politik transformatif dan dimensi pedagogi kritis ke dalam *cultural studies*.

Carlos Torres memasukkan topik seperti negara, kekuasaan, problema globalisasi, multikultural, saling koneksi antarnegara, ras, gender, kelas, dan peran teori sosial dalam memahami konflik dalam pendidikan kontemporer. Pemahaman tentang masalah ini perlu dalam mengonstruksi pendidikan yang memajukan individu, solidaritas, dan penghormatan pada perbedaan serta dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Pendidikan kritis selalu menekankan kontribusi pendidikan terhadap transformasi pendidikan dan demokratisasi masyarakat secara radikal (Kelnner 2003: 224). Giroux menggambarkan *cultural studies* sebagai kajian yang "melintas batas" karena melibatkan berbagai perspektif transformatif-transdisipliner yang menghasilkan abstraksi dan pemisahan disipliner, seperti bidang pendidikan, teori sosial, dan kajian sastra.

Giroux mengemukakan betapa pentingnya *cultural studies* dalam merekonstruksi pendidikan kontemporer, kebutuhan pemahaman baru atas budaya, serta politik budaya dan pendidikan yang melampaui ortodoksi kiri dan kanan. Dalam buku *Border Crossings* (1992) dan *Living Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Culture* (1993), Henry Giroux memasukkan gagasan wacana pascastruktural dan pascamodern ke dalam kajian *cultural studies*nya, seperti politik identitas, perbedaan, kelas, gender, dan seksualitas ke dalam konsep pendidikannya. Ia mengkritik teori pendidikan yang mengabaikan perkembangan baru yang ia sebut sebagai "lautan perubahan dalam teori sosial" dan ini mewarnai paradigma baru pendidikan yang dianggap mampu memberdayakan generasi mendatang, mampu menghidupkan demokrasi untuk milineum baru yang kita masuki.

PERBEDAAN BUDAYA PLURAL DENGAN BUDAYA MULTIKULTURAL

Masyarakat plural (*plural society*) tidak sama dengan masyarakat multikultural. Namun, masyarakat plural adalah dasar bagi perkembangannya tatanan masyarakat mutikultural (*multicultural society*), yang di dalamnya masyarakat dan budaya berinteraksi dan berkomunikasi secara intensif. Masyarakat plural mengacu pada suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai unsur masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda satu sama lain (Furnival 1948). Dalam masyarakat plural, tiap anggota masyarakat relatif hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Hubungan antarberbagai unsur yang berbeda itu juga ditandai oleh corak hubungan yang dominatif dan, karena itu, bersifat diskriminatif, walaupun wujud diskriminatif itu umumnya bersifat sangat tersamar. Keanekaragaman budaya, agama, dan bahasa tidak sama artinya dengan masyarakat multikultural. Ada perbedaan cukup mendasar antara pluralisme budaya, pluralisme etnis, pluralisme ras, dan agama dengan pengertian *cultural studies* yang sekarang ini banyak dibicarakan.

Pembedaan konsep tersebut perlu diperjelas sehingga kecenderungan untuk menyamakan kedua konsep itu dapat dihindari. Istilah pluralisme

(*pluralism*) itu dapat dikaitkan dengan pluralisme ontologis, pluralisme epistemologis, dan pluralisme etis. Pluralisme ontologis adalah berupa keyakinan bahwa realitas fundamental itu bersifat jamak, bukan tunggal (monisme ontologis) atau bukan pula dua (dualisme ontologis). Pluralisme meyakini bahwa ada banyak tingkatan realitas dalam alam semesta, yang di dalamnya yang satu tidak dapat direduksi pada yang lain, masing-masing independen pada dirinya sendiri.

Dalam pandangan ini alam semesta (realitas) tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional secara fundamental. William James, misalnya, adalah seorang pemikir yang mengakui dirinya sebagai pluralis dengan menyatakan pluralisme realitas dan dunia dalam konteks dominasi relasi-relasi eksternal. Dalam bidang sosial-budaya, pluralisme adalah keyakinan bahwa realitas sosial-budaya itu beragam. Berbagai kelompok dengan budaya dan nilai masing-masing relatif independen dan organisasinya mewakili bidang dan pekerjaan yang berbeda-beda.

Berkaitan dengan pluralisme sosiologis, dikenal pula istilah *pluralisme filosofis*, yang di dalamnya orang memiliki berbagai pandangan yang berbeda yang secara mendasar disebabkan pandangan mengenai agama serta makna terdalam dari kehidupan manusia. Chang Tung Sun adalah tokoh yang menggabungkan unsur-unsur kontruksionalisme dengan pluralisme dan menamakan doktrin atau pandangannya dengan *pluralisme epistemologis*. Pluralisme epistemologis adalah pandangan yang berkaitan dengan pengetahuan yang menyatakan bahwa di dalam ilmu pengetahuan tidak ada satu metode, satu logika atau aturan yang berlaku umum yang diterima oleh kaum ilmuwan, baik dalam satu bidang ilmu pengetahuan maupun dalam berbagai bidang ilmiah.

Dengan demikian, ada berbagai paradigma, kerangka teori, perspektif, dan metodologi yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Positivisme dan positivisme logis dengan prinsip kesatuan ilmu pengetahuan (*unified sciences*) merupakan satu bentuk monisme ontologis dan epistemologis. Feyerabend mengkritik pandangan *unified science* itu dengan mengajukan pluralisme metodologi melalui prinsip "*anything goes*" (metode apa pun boleh) (lihat Lubis 2003). Masalah pluralisme budaya, pluralisme etnis, bahasa, ras, dan agama sesungguhnya sudah merupakan realitas yang sudah sangat lama berada di tengah-tengah kehidupan kita. Namun, ada perbedaan sikap dalam menghadapi pluralisme itu di antara berbagai budaya, baik di Timur maupun di Barat. Di negara Barat dan negara maju masalah yang berkaitan dengan pluralisme (perbedaan) umumnya dihadapi dengan pengakuan dan penyelesaian secara yuridis formal (aturan hukum), dialog, dan penegakan hak-hak asasi manusia, bukan melalui cara-cara kekerasan.

Ada perbedaan antara ciri-ciri masyarakat multikultural dan masyarakat plural. Pada masyarakat multikultural, interaksi aktif antara masyarakat dan budaya yang plural itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai unsur yang ada dalam masyarakat dipandang dan ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar dan setara sehingga tercipta keadilan di antara

berbagai unsur/budaya yang berbeda itu. Sebagaimana dikemukakan di atas, multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996). Dalam masyarakat multikultural, perbedaan budaya, perbedaan etnis, lokalitas, bahasa, ras, bangsa, dan lain-lain dilihat sebagai mozaik yang memperindah masyarakat. Prinsip keanekaragaman, perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak asasi, dan solidaritas merupakan ideologi yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi.

Cultural studies, studi feminis, teori atau kajian pascakolonial, dan multikulturalisme berkembang terutama setelah tahun 1980-an pada saat pemikiran sosial-budaya sudah dipengaruhi oleh gagasan pascamodern—meskipun akhir tahun 1950—1960-an *cultural studies* sudah mulai lahir di Inggris. Bidang ilmu pengetahuan baru ini sering digolongkan dalam “ilmu kemanusiaan baru” yang lahir dari pemunculan berbagai masalah sosial-budaya pascamodern. Deleuze dan Guattari menyebut pengetahuan ini dengan “pengetahuan minor”, yaitu bentuk-bentuk pengetahuan dan kebudayaan yang telah secara kejam dikeluarkan (deteritorialisasikan) dari sistem pemikiran yang dominan pada masa modern (Deleuze dan Guattari 1986). Michel Foucault menyebutnya sebagai budaya yang terpinggirkan pada masa modern. Oleh Foucault dan pascamodernis, budaya itu diangkat kepermukaan sebagai kajian yang memiliki status ilmiah yang wajar.

BUDAYA MULTIKULTURAL DAN PASCAMODERNISME

Keterkaitan gagasan pascamodernis dengan *cultural studies* dan kajian budaya multikultural sudah banyak disinggung pada penjelasan di atas. Pengertian multikultural dikontraskan dengan monokultural (budaya yang homogen). Istilah multikultural mengacu pada banyak kebudayaan (heterogen), yang membentuk identitas satu kebudayaan. Seseorang yang tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan yang penduduknya terdiri dari berbagai budaya (Eropa, Amerika, Asia, Afrika) yang terdapat di berbagai kota-kota besar di dunia (New York, Washington, Tokio dan lain-lain) merupakan salah satu fenomena budaya multikultural yang berkembang sekarang ini. Multikulturalisme dan globalisme menimbulkan identitas baru, yaitu terdapatnya berbagai kebudayaan pada diri seorang anak (hibrid) sehingga identitas anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan itu bersifat multikultural. Dari istilah multikultural itu kemudian diturunkan istilah multikulturalisme, yang artinya adalah gagasan yang berisikan upaya untuk memahami hakikat kompleksitas kebudayaan seperti yang disebut di atas serta saling kait antara satu kultur (budaya) dan budaya lain yang menjadi unsur-unsur kebudayaan multikultural tersebut. Kota besar di Amerika yang dihuni oleh berbagai latar belakang budaya, etnis, agama, bahasa, dan ras dianggap salah satu contoh kebudayaan multikultural itu.

Budaya multikultural menerima dan menghargai berbagai perbedaan serta memasukkan pengaruh budaya yang terpinggirkan selama ini sebagai

salah satu unsur budaya yang diakui ikut mempengaruhi budaya secara keseluruhan. Seorang ahli sosiologi, antropologi, atau psikologi yang mencoba meneliti fenomena sosial-budaya multikultural ini sering dihadapkan pada masalah atau problem multikultural, yaitu tidak dimilikinya identitas budaya khusus oleh seseorang sehingga, yang dapat dipahami berdasarkan kategori ilmiah tradisional atau modern sehingga hasilnya tidak memuaskan. Penyebabnya adalah adanya perbedaan mendasar antara paradigma *cultural studies* dan multikultural itu dengan budaya modern. Karena itu, paradigma modern tidak tepat digunakan dalam memahami *cultural studies* dan budaya multikultural.

Multikulturalisme, menurut Ben Agger, adalah versi paling politis dari pascamodernisme Amerika. Multikulturalisme adalah varian dan turunan dari prinsip perbedaan yang diajukan kaum pascamodernis, yang di dalamnya penghargaan terhadap perbedaan lebih diutamakan daripada kesamaan dan kesatuan (Agger 2003: 140). Hampir sama dengan Agger, Rogers (1996) mengemukakan bahwa masalah multikulturalisme, walaupun tidak eksklusif, agak khas berkaitan dengan budaya Amerika, yang berkembang sebagai lanjutan dari gelombang kedua perjuangan hak-hak sipil yang membentuk masyarakat Amerika setelah tahun 1950–1960-an. Namun, sekarang isu-isu multikultural itu sudah menjadi kebijakan publik di Belanda, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain (Ritzer 2003: 322–324).

Teori sosial feminis—ada yang memasukkan kajian ini pada *cultural studies* dan ada yang memasukkannya pada multikulturalisme—mendahului kajian multikulturalis dengan mengkritik kajian feminis yang didominasi suara segelintir kaum perempuan kulit putih, sementara suara kaum feminis mayoritas, yaitu perempuan Afrika, Asia, dan Amerika Latin, tidak didengar dan dipinggirkan. Kemudian muncul suara-suara kaum perempuan kulit hitam Amerika, kulit hitam Afrika, Asia, dan lain-lain (Ritzer 2003: 324). Collins (1990), misalnya, mendiskusikan suara feminis dari perspektif Afrosentris, Segura dan Pesquera (1966) menelaah suara kaum perempuan Meksiko, Butler (1990) mengemukakan teori feminis banci (1990), dan Min-ha (1989) mengkaji feminisme pascaklonial. Bahkan, feminisme dikaji dari perspektif kaum pria (Connel 1996).

Dengan demikian, *cultural studies* dan kajian multikultural berkaitan erat dengan pandangan atau keyakinan yang mengakui adanya banyak kultur (pluralisme budaya, multikultur, multiras, multireligius, multilingual) yang memungkinkan suara-suara dan tuntutan yang berbeda satu dengan yang lain hidup secara berdampingan. Setiap kultur itu berinteraksi, berkomunikasi satu dengan yang lain secara instens. Multikultural(isme) memiliki hubungan yang begitu rumit dengan teori sosial pascamodern. Pada umumnya teoretisi multikultural adalah pascamodernis dan mendukung sikap mental pascamodernis. Walaupun tidak secara langsung keduanya identik, iklim intelektual yang dikembangkan pascamodernis memungkinkan multikulturalisme berkembang dengan pesat.

Teori pascamodern mendukung perspektif polivokal (multikultural) dan mengabaikan perspektif ilmiah yang monovokal (logosentrisme, eurosentrisme, androsentrisme) sebagai paradigma yang dominant pada masa modern. *Cultural studies*, teori feminis, dan pascakolonial bukan meninggalkan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, tetapi menolak bila dikatakan bahwa hanya ada satu perspektif, hanya ada satu pengalaman (pengalaman yang sama) untuk setiap budaya, apalagi ada satu cerita (narasi besar) yang benar-benar sama, termasuk untuk satu peristiwa sekalipun. Ada banyak perspektif, seperti kepentingan dan narasi yang berkembang ketika Amerika menyerang Irak atau ketika Saddam Husein ditangkap tentara Amerika. Narativitas pascamodern dan feminis bersifat multivokal dan multikultural. Pengetahuan perspektifis diartikulasikan dalam bentuk narasi-narasi kecil. Dialektika pengalaman sehari-hari pasti bersifat parsial dan kontekstual, termasuk jika penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti fenomena itu (Agger 2003: 360–361).

Aspek penghargaan dan saling memahami dan menghargai menjadi satu aspek yang sangat penting dalam multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat pada definisi Lawrence Blum yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai berikut. Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia mencakupi penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan untuk menyetujui seluruh aspek budaya tersebut, tetapi untuk melihat bagaimana sebuah budaya asli dapat mengekspresikan nilai bagi para anggotanya. Pengertian itu jelas tidak mengabaikan dimensi kritis dalam kajian multikulturalisme, dengan memberikan penilaian atau pertimbangan tentang berbabi budaya dan nilai-nilainya. Akan tetapi, prinsip perbedaan merupakan kata/konsep kunci pada multikulturalisme. Konsep ini memang menjadi konsep penting dalam budaya pascamodern. Multikulturalisme sangat tidak setuju dan mencoba memerangi sifat entosentrisme dan rasisme yang biasanya timbul sebagai akibat tidak mengetahui pandangan dan nilai-nilai lain. Ketakpahaman dan ketidakpedulian pada orang lain dalam sejarah kehidupan umat manusia telah menimbulkan perang, kematian, dan kehancuran yang luar biasa.

Problem multikulturalisme sekarang ini sungguh tidak dapat diabaikan karena setiap saat kita dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan problem multikultural tersebut. Misalnya, ketika para ilmuwan berhasil melakukan rekayasa genetik sehingga melahirkan lahirnya domba dengan pengklonan, ataupun pengakuan secara hukum perkawinan sejenis di Belanda, maka berbagai macam pandangan baik yang menentang dan mendukung bermunculan. Masalah etika (bisnis, lingkungan, bioetik) adalah salah satu masalah yang menuntut pendekatan multikultural sehingga semua pihak dapat berperan dalam membina kedamaian dalam desa global ini.

Pierre L. van de Berghe mengemukakan karakteristik masyarakat multikultural yang khas, antara lain (i) masyarakat terdiri dari segmentasi

dalam bentuk kelompok-kelompok dengan latar budaya dan subbudaya yang berbeda, (ii) masyarakat memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer, (iii) kemauan untuk menemukan konsensus antaranggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang fundamental masih kurang, (iv) kesadaran mengembangkan konsensus relatif masih kurang sehingga sering timbul konflik antarkelompok budaya/subbudaya yang ada, (v) konflik dan integrasi sosial dapat berlangsung justru dengan jalan menggunakan kekuasaan (paksaan) serta rasa ketergantungan ekonomi antarsatu subkultur/kultur dengan yang lainnya, dan (vi) terdapat dominasi politik satu kelompok atas kelompok yang lain (Purwasito 2003: 301–302).

Meskipun perbedaan dan keanekaragaman merupakan konsep kunci, harus diperhatikan bahwa multikultural tidak saja mengakui adanya keanekaragaman budaya serta interaksi dan saling mempengaruhi antara kultur yang satu dan yang lain secara intensif sebagai dampak terdapatnya berbagai budaya yang tinggal pada satu daerah/kota. Interaksi budaya juga terjadi melalui pengaruh media TV yang menampilkan berbagai acara dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Mungkin gagasan Anthony Giddens tentang saling pengaruh budaya global dan lokal (global paradok) dapat menengahi dua posisi ekstrem ini. Sejalan dengan itu, Luke menawarkan konsep “glokal” untuk menggambarkan perlunya keseimbangan di antara dua posisi yang dipertentangkan, yaitu antara yang global dan yang lokal atau antara metanarasi dan mininarasi.

Multikulturalisme tidak menerima konsep dokotomi diri *versus* orang lain (*the other*), pemilik modal lawan kaum proletar, kebudayaan kita *versus* kebudayaan mereka, orang dalam *versus* orang luar, relativisme *versus* objektivisme, dan kesamaan *versus* perbedaan, karena dualisme menimbulkan pertentangan di antara dua entitas dan dua kekuatan yang harus dipilih yang satu dengan yang lainnya (*either/or*). Multikulturalisme lebih menerima bentuk pemikiran dialektis, dengan perbedaan tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat absolut bertentangan, tetapi dua hal yang saling membutuhkan. Pendekatan dualistik seperti “atomisme” atau individualisme *versus* “holisme” adalah pendekatan yang berat sebelah sehingga lebih tepat apabila dilakukan sintesis atas dualisme itu untuk menemukan wawasan yang lebih memadai. Dalam pandangan dialektis, kita (individu) dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan, dan kebudayaan serta masyarakat juga dibentuk oleh individu-individu. Identitas dan perbedaan adalah dua kategori yang saling memerlukan; secara dialektis keduanya saling berhubungan, baik secara epistemologis maupun secara ontologis.

Secara epistemologis semua pemahaman bersifat “komparatif”, maksudnya pemahaman diri (*self*) mengharuskan adanya “yang lain” (*the other*). Hanya dengan melalui interaksi, dialog, dengan yang lainlah saya mengetahui diri saya dan apa yang berbeda antara saya dan orang lain. Dengan demikian, identitas dan perbedaan adalah dua hal yang terkait secara ontologis. Pandangan interaksionisme yang melihat manusia dan

kebudayaan, hubungan “diri” dengan “yang lain”, memiliki kedudukan yang sama. Identitas diri bahkan juga terkait dengan identitas yang lain. Bentuk identitas tidak dicari di luar perbedaan, tetapi di dalam perbedaan itu.

Fay (2002: 326-363) mengemukakan dua belas tesis filsafat multikultural berikut yang harus diperhatikan.

- (1) Waspada terhadap adanya dikotomi, hindari dualisme jahat, dan berpikirlah secara dialektis. Kita harus berupaya untuk tidak terjebak dalam model berpikir hitam putih karena model berpikir ini merusak metateori dalam ilmu-ilmu sosial-budaya. Berpikirlah secara dialogis, cair, dan terbuka.
- (2) Jangan menganggap orang lain sebagai “yang lain”. Perhatikanlah persamaan dan perbedaan sebagai istilah-istilah relatif yang saling berpresuposisi. Perbedaan dan persamaan satu sama lain saling membutuhkan. Kita mengenal diri kita, memiliki kebaikan dengan berhubungan dengan orang lain. Identitas pribadi bersifat dialogis.
- (3) Transendensikan kesalahan memilih antara universalisme dan partikularisme (kekhususan), asimilasi, dan pemisahan. Daripada berusaha mengatasi perbedaan atau menguatkannya, berintegrasilah dengan mereka yang berada dengan cara memanfaatkan perbedaan, dengan pandangan diarahkan pada pembelajaran dan perkembangan dan perkembangan yang terus menerus saling menguntungkan.
- (4) Berpikirlah secara proses, bukan secara substansif, maksudnya berpikir bukan sesuatu yang sudah selesai. Ada faktor historis sebagai elemen pokok pada seluruh entitas sosial. Amatilah terjadinya pergeseran transformasi, evolusi, dan perubahan di mana-mana. Objek yang diteliti pada ilmu sosial-budaya, tidak sama dengan objek penelitian ilmu-ilmu alam.
- (5) Doronglah keagenan pada apa-apa yang dipelajari. Ekspresi kehidupan kultural dan sosial dihasilkan oleh para agen (pelaku) melalui kegiatannya dan perilaku itu bukan hal yang bersifat mekanis.
- (6) Kenalilah agen karena agen itu ditempatkan pada situasi yang menguatkan sekaligus membatasi.
- (7) Harapkan lebih banyak pencerahan dari tindakan manusia atau produk apa pun yang berusaha Anda pahami.
- (8) Pandanglah masyarakat secara holistik, bukan sebagai atom-atom (*monade*) yang satu sama lain terpisah. Jangan pandang orang yang berada pada kultur atau kelompok yang berbeda sebagai suatu yang terpisah dari Anda. Dalam melakukan penelitian jangan terlalu menekankan persamaan suatu kultur satu masyarakat. Janganlah terlalu melihat masyarakat sebagai “kesatuan organik”. Pandangan “kesatuan organik” itu keliru karena masyarakat yang homogen sekalipun memiliki perbedaan internal (agama, jenis kelamin, kelas, kasta, suku, dan lain-lain). Dalam masyarakat informasi dan globalisasi sekarang ini, betapapun suatu masyarakat terisolasi, akan tetap ada pengaruh ekonomi dan sosial-budaya secara umum.
- (9) Masa lalu berperan dalam membentuk kita pada masa sekarang. Namun, cobalah kita renungkan apa yang kita lakukan pada masa lalu. Masa kini mengandung masa lalu dan masa yang akan datang.
- (10) Perhatikan adanya retakan atau diskontinuitas historis, kultural, dan epistemologis pengetahuan ilmu sosial. Sadarlah bahwa apa yang kita ketahui saat ini akan ketinggalan zaman dengan perubahan konseptual, paradigmatik, atau perubahan lainnya dalam kehidupan kita maupun pada kehidupan mereka yang kita teliti. Juga harus diingat bahwa dalam ilmu-ilmu sosial ada godaan atau kecenderungan untuk menemukan teori universal, kesamaan, dan pola penjelasan kausalitas seperti pada ilmu-ilmu alam — prinsip ini tidak dapat diberlakukan sepenuhnya pada ilmu sosial-budaya.
- (11) Jangan bersembunyi di balik topeng ilusi netralitas dalam mengamati atau memahami diri dan orang lain. Hargailah perangkat intelektual yang ada bahwa dalam mengkaji

orang lain. Selalu ada kemungkinan perubahan cara kita dalam berinteraksi. Berusahalah untuk memahami orang yang Anda teliti dan selalulah bersifat kritis. Objektivitas membutuhkan sifat terbuka dan akuntabilitas, alih-alih netralitas dan objektivitas, karena sesungguhnya ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan penelitian, bukan mencerminkan realitas sebagaimana adanya.

- (12) Para pendukung multikulturalisme sering mengemukakan bahwa kajian ilmiah mengenai orang lain akan mengarahkan pada penghormatan terhadap orang lain yang berbeda, terhadap integritas pandangan hidup yang ganjil, dan penghargaan terhadap perbedaan antara kita dengan mereka. Perbedaan ini terkadang terlalu berjarak dan dapat pula bersifat relatif dan dinamis. Dapat juga apa yang dilakukan orang (budaya) lain tidak dapat kita terima. Pemahaman terhadap orang lain memerlukan sikap kritis terhadap "kita" dan "mereka" sehingga interaksi dan perkembangan yang lebih baik dapat diciptakan.

Apakah *cultural studies* dan kajian multikultural(isme) dapat menanamkan toleransi serta membina solidaritas dan kesadaran bahwa di tengah berbagai perbedaan itu tetap ada nilai-nilai kemanusiaan dan martabat yang harus tetap dihormati bersama? Tujuan menyadari perbedaan serta menumbuhkan toleransi, solidaritas, dan kebersamaan mungkin termasuk bagian dari tujuan — mungkin tujuan utama — mempelajari dan mengangkat isu-isu sekitar *cultural studies*, multikulturalisme, feminisme, dan teori pascakolonial, sehingga kedamaian dan persamaan hak dapat diciptakan dalam budaya plural dan multikultural yang semakin menggejala ini. Kajian terhadap berbagai praktek budaya yang ada, praktek budaya yang hegemonis dan menindas, pada akhirnya dapat menjadikan *cultural studies* sebagai alat dan pusat pelatihan untuk menciptakan kader-kader bagi politik budaya baru yang berbicara dan berjuang demi kepentingan masyarakat banyak dalam desa global ini.

Globalisasi kebudayaan dunia dan ekonomi telah pula mengembangkan perhatian luar biasa terhadap masalah politik budaya kontemporer, seperti perbedaan budaya, pluralisme, multikulturalisme, dan feminisme. Dalam kebhinnekaan sosial dan budaya, orang yang lahir dan besar pada lingkungan sosial-budaya yang berbeda akan berbeda dalam banyak hal — dalam nilai-nilai moral, tujuan, dan makna hidup — sehingga apa yang benar bagi seseorang atau satu budaya belum tentu benar bagi orang atau budaya lain. Ada beberapa dasar yang membuat perbedaan: kewarganegaraan, kelas, gender, agama, bahasa, ras atau etnik, dan lain-lain. Pada kajian multikultural(isme) dan *cultural studies*, aspek perbedaan sosial-kultural seakan-akan menjadi fokus kajian.

Ada beberapa tesis filsafat multikultural dalam ilmu sosial-budaya yang perlu dipahami dan dikembangkan dalam budaya multikultural, antara lain (i) hindarkan cara berpikir dikotomis, hindarilah dualisme jahat dan berpikirlah secara dialektis; (ii) jangan menjadikan orang lain sebagai orang lain dan jadikanlah perbedaan sebagai dasar untuk saling memahami; (iii) berdialog dan berinteraksilah dengan orang lain; (iv) berpikirlah sebagai kata kerja (proses, transformasi, evolusi) bukan sebagai kata benda, (v) jangan bersifat etnosentris, namun carilah hal-hal yang lebih mendekatkan

satu dengan yang lain. Tesis-tesis tersebut jelas berkaitan dengan metode berpikir *cultural studies* dan multikulturalisme yang menghindari model berpikir liner, dualis, dan statis.

"CULTURAL STUDIES" DAN PROBLEM METODOLOGI

Penghindaran atas model berpikir linear, dualis, dan statis sejalan dengan asumsi ontologis kajian budaya yang melihat budaya yang senantiasa mengalami perubahan, kontekstual, plural, dan lokal. Asumsi ontologis yang demikian secara paradigmatis lebih cocok dengan paradigma konstruktivis(me). Pengetahuan bukanlah pernyataan (klaim) sebagai penemuan mengenai objek sejati, namun konstruksi-konstruksi interpretatif mengenai objek. Teori sebagai klaim (interpretatif) dapat dianggap benar atau setidaknya mendekati kebenaran berdasarkan perspektif atau paradigma si peneliti. Karena itu, dengan paradigma konstruktivis (seperti pascastrukturalis dan pascamodernis), klaim-klaim kebenaran teori lebih dilihat sebagai produksi kebenaran dalam permainan bahasa (*language games*) tertentu.

Tentu saja ada kritik yang muncul mengenai masalah metode dan status keilmiahan kajian budaya kontemporer ini—kritik yang sepertinya melanjutkan perdebatan metodologi kuantitatif dengan kualitatif. Pascastrukturalis, pascamodernis, dan konstruktivis menolak kebenaran objektif-universal didasarkan atas pandangan yang menyatakan ketakungkinan adanya korespondensi antara kata dan dunia (objek, realitas) sehingga tidak mungkin ada representasi akurat. Dalam pandangan Rorty, kesepakatan mengenai prosedur ilmiah pada ilmu alam sepadan dengan bukti dan gaya puitis secara pragmatis. Objektivitas ilmiah, menurutnya, haruslah dibaca sebagai solidaritas sosial, sedangkan kebenaran merupakan kesepakatan sosial yang maksimal (Rorty 1991; Lubis 2003).

Cultural studies dan kajian budaya sekarang ini lebih banyak menggunakan metode kualitatif karena selalu mempertimbangkan masalah ideologi, kepentingan, kuasa, dan makna budaya. Karena itu, metode hermeneutika dengan variannya (lihat Lubis 2004) dan fenomenologi dengan variannya (etnografi, etnometodologi) yang memungkinkan "deskripsi mendalam" dan "multiplitas paradigma dan kerangka konseptual" lebih diterima para pendukung kajian ini. Kritik tajam pada metode ini berkaitan dengan objektivitas teori karena teori yang dihasilkan dianggap tidak dapat melepaskan diri dari posisi dan pengalaman peneliti secara intensif sehingga kebenarannya bersifat posisional (tidak objektif) (Clifford 1988: 25). Karena itu, metode yang menekankan kesatuan dan keseragaman objek dan metode seperti paradigma positivisme (Rorty menyebutnya *epistemology*) dianggap sudah mati. Dalam perspektif Richard Rorty tidak ada perbedaan fundamental antara metodologi etnografi dengan metodologi kajian novel yang penuh makna. Keduanya tidak bertujuan menemukan makna objektif, namun menghasilkan empati dan

semakin meluasnya solidaritas antarsesama. Masalah etnografi dan metode *cultural studies* berkaitan dengan penerjemahan dan penafsiran, bukan masalah kebenaran objektif dan universal. Objektivitas ilmiah, menurut Rorty, harus dibaca sebagai solidaritas sosial, sedangkan kebenaran ditandai oleh konsensus sosial yang maksimal (Rorty 1991). Dengan demikian, *cultural studies* telah mengembangkan kriteria keilmiah yang didasarkan atas nilai-nilai sosial-politik dan analisis ideologis. Dari perspektif ini tidaklah terlalu masuk akal jika kita mendiskusikan apakah kebudayaan secara formal itu baik atau buruk; justru yang menjadi pertimbangan adalah nilai dan konstruksi ideologis serta konsekuensi potensialnya.

KESIMPULAN DAN ANALISIS KRITIS

Cultural studies dan multikultural adalah kajian yang berbeda dengan kajian budaya modern, karena *cultural studies* dan multikulturalisme didasarkan pada epistemologi pascapositivisme (teori kritis, pascastrukturalis, dan pascamodern). *Cultural studies* adalah kajian yang melintasi batas-batas disiplin, sebagaimana dilakukan Habermas dan Pierre Bourdieu. Para pendukung (ahlinya) banyak tertarik meneliti budaya populer, media massa, serta sistem ekonomi dan sosial-budaya yang dominan. Kemudian mereka berupaya untuk mengkritik dan mendekonstruksi dominasi, hegemoni, serta bias rasisme, negara, kelas, gender yang terdapat dalam masyarakat atau budaya tersebut. Bennet menyatakan bahwa *cultural studies* adalah kajian yang menekankan keterkaitan budaya dengan masalah sosial dan kehidupan sehari-hari (budaya populer).

Masyarakat plural tidak sama dengan masyarakat multikultural. Meskipun sama-sama berhubungan dengan budaya yang beraneka ragam, pada masyarakat multikultural terjadi saling pengaruh dan interaksi yang intensif antarbudaya. Multikulturalisme adalah masyarakat yang menerima perbedaan, persamaan, keadilan, kesederajatan, dialog, solidaritas. Dalam masyarakat multikultural perbedaan dilihat seperti mozaik yang semakin memperindah kehidupan satu masyarakat. Ben Agger menyatakan bahwa multikulturalisme adalah versi paling politis dari pascamodernisme. Kiranya cukup jelas bahwa multikulturalisme sangat dijiwai oleh pascamodernisme serta ideologi neoliberal sebagai dasar bagi perspektif multikultural (polivokal).

Di Indonesia beberapa studi dan penelitian *cultural studies* serta multikultural sudah mulai dilakukan. Hal ini tentu baik karena pemahaman tentang *cultural studies* dan multikultural(isme) diharapkan dapat membantu mengembangkan prinsip demokrasi, persamaan, dialog, dan solidaritas yang sangat diperlukan bagi kehidupan yang lebih nyaman dengan saling menghormati antarberbagai etnis, budaya, agama, dan ras dalam abad informasi dan globalisme sekarang ini. Di sisi lain, perlu pula disadari bahwa tidak semua budaya dan tradisi pemikiran Barat (multikulturalisme) itu baik bagi perkembangan masyarakat kita sehingga

sikap kritis tetap diperlukan menghadapi berbagai masalah budaya yang berkembang akhir-akhir ini.

DAFTAR ACUAN

- Agger, Ben (2003), *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasi*. (terj. Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Appleby, Joyce (et al.) (1996), *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*. New York: Rotledge.
- Baudrillard, Jean (1983), *Simulations*. New York: Semiotext(e).
- Barthes, Roland (1973), *Mythologies*. London: Paladin.
- Berger, P.L & Luckmann (1986), *The Social Construction of Reality; A Treatise in Sociology of Knowledge*. Harmondsworth: Penguin.
- Beilhard, Peter (2002), *Teori-Teori Sosial*. (terj. Sigit Jatmiko). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bell, Daniel (1992), *The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas In the Fifties*. New York: Free Press.
- Bennet, Tony (1982), "Popular Culture: Themes and Issues" dalam *Popular Culture Arts in Amerika*. Open University Press.
- Bleicher, J. (1980), *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Bourdieu, Pierre and Waquant, Loic J. D., (ed) (1992), *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cahoon, Lawrence (ed), (1996), *From Modernism to Postmodernism: An Anthology*. Blackwell Publisher.
- Deleuze, Gilles, and Guattari, Felix (1972/1983), *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln (1994), *Handbook of Qualitative Research*. London-New Delhi: Sage Publication.
- Derrida, J. (1974), *On Grammatology*. Baltimore: John Hopkins.
- Durham, Meenakshi & Douglas M. Kellner (ed) (2002), *Media Cultural Studies: Key-Works*. Blackwell Publishers Inc.
- Fay, B. (1996), *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Black Well.
- Foucault, Michel (1965), *Madness and Civilization*, (terj. Richard Howard). Random House Inc.
- (1970), *The Order of Things: An Archeology of the Human Science*. New York: Random House.
- (1972), *The Archeology of Knowledge and Discourse on Language*, (terj. Alan Sheridan). Travistock.
- (1977), *Discipline and Punish; The Birth of Prison* (terj. Alan Sheridan). London: Worcester, Billing & Sons.
- Feyerabend, Paul (1975), *Against Method*, Verso. London: Sheed and Ward.
- Gadamer, H. G. (1975), *Truth and Method*. London: Sheed and Ward.
- Gandhi, Leela (2001), *Postcolonial Theory A Critical Introduction* (terj.) Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Giroux, H. (1981), *Ideology, Culture and the Process of Schooling*. London: Falmer Press.
- (1992), *Border Crossing; Cultural Workers and the Politics of Education*. London: Routledge.
- Giroux, H. & Aronowitz, S. (1986), *Education Under Siege: The Conservative, Liberal and Radical Debate over Schooling*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Glaser, N. (1997), *We Are All Multiculturalist Now*. Cambridge: Harvard University Press.
- Guba, Egon G. (ed) (1996), *The Paradigm Dialog*. London-New Delhi: Sage Publications.
- Gramsci, Antonio (1971), *Selections From Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Habermas, J. (1978), *Theory and Practice*. Boston: Beacon Press.
- (1987a), *The Theory of Communicative Action* (Vol. I). Boston: Beacon Press.

- (1987b), *The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures*. Mass.: MIT Press.
- Heckman, Susan, J. (1990), *Gender and Knowledge: Elements of Postmodern Feminism*. Cambridge: Polity Press.
- Hekman, S.J. (1986), *Hermeneutics and the Sociology of Knowledge*. Oxford: Polity Press.
- Jameson, Fredrich., Menakshi, Durham dan Keller, Douglas M. (ed) (2002), "The Pascatmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism" dalam *Media and Cultural Studies*. Key-Works.
- Hoggart, Richard (1990), *The Use of Literacy*. Harmondsworth: Penguin.
- Keller, Douglas (1995), *Media Culture*. London and New York: Routledge.
- (2003), *Teori Sosial Radikal* (terj. Eko, Rindang Farichah). Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- King, Richard (2001), *Agama, Orientalisme, dan Postkolonialisme: Sebuah Kajian Tentang Pertelingkahan Antara Rasionalitas dan Mistik*. (terj. Agung Prihantoro). Yogyakarta: Qalam.
- Kvale, Steiner (ed.) (1992), *Psychology and Postmodernism*. London: Sage Publications Ltd.
- Kuhn, Thomas S. (1970), *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago University Press.
- Leche, John (1994), *Fifty Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postmodernism*. London-New York: Rotledge.
- Lubis, Akhyar Yusuf (2003), *Paul Feyerabend Penggagas Antimetode*. Jakarta: Teraju-Mizan.
- (2004), *Setelah Kebenaran dan Kepastian Dihancurkan Masih Adakah Tempat Berpijak bagi Ilmuwan*. Bogor: Akademia.
- Lyotard, Francois (1971), *Discourse Figure*. Paris: Klincksieck.
- (1973), *Libidinal Economy* (trans. I Hamilton Grant). Bloomington: Indiana University Press.
- (1973), *Just Gaming* (With Jean-Loup Thebaud) (terj. Wlad Godzich). Minneapolis: Minnesota University Press, Manchester University Press.
- (1982–1985), *The Postmodern Explained to Children: Correspondence* (terj. Julian Pefanis & Morgan Thomas). Sydney: Power Publications.
- (1983), *The Different: Phrases in Dispute* (trans. George ven den Abeele). Minneapolis: Minnesota University Press; Manchester University Press.
- (1984), *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (trans. Geoff Bennington and Brian Massumi). Minneapolis: University of Minneapolis Press.
- (1989), *The Lyotard Reader*. Oxford: Basill Blackwell.
- Miller, Toby (ed.) (2001), *A Companion to Cultural Studies*. Blackwell Publishers Inc.
- Nieto, S. (1992), *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman.
- Norris, Christopher (1997), *New Idols of the Cave: on the Limits of Anti-realism*. Manchester University Press.
- Palmer, Richard E. (2003), *Hermeneutika Teori Baru mengenai Interpretasi* (terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwasito, Andrik (2003), *Komunikasi Multikultural*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ritzer, George (2003), *Teori Sosial Pascatmodern* (terj. Muhammad Taufik). Yogyakarta: Juctapascae Publication Study Club dan Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Roberts, Tyler T. (2002), *Spiritualitas Postreligijs: Eksplorasi Hermeneutis Transfigurasi Agama dalam Praksis Filsafat Nietzsche* (terj. M. Khatarina). Yogyakarta: Qalam.
- Robinson, Dave (2002), *Seri Postmodern, Nietzsche dan Postmodernisme* (terj. Sigit Jatmiko). Yogyakarta: Jendela.
- Rorty, Richard (1980), *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- (1983), *Consequences of Pragmatism, (Essay: 1972-1980)*. Minneapolis Univ. Press.
- (1991), *Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers (Vol. I)*. Cambridge University Press.
- Thompson, John B. (2004), *Kritik Ideologi Global, Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. (terj. Haqqul Yaqin). Yogyakarta: IrCiSod.

- Turner**, Bryan S. (2002), *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat: Bongkar Wacana Atas: Islam Vis A Vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme dan Globalisme* (terj. Sirojuddin, Arif dkk.). Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Sardar**, Ziauddin., Van Loon, Borin (2001), *Cultural Studies for Beginners* (terj. Alfatri Aldin). Bandung: Mizan.
- Sheridan**, Alan (1980), *Michel Foucault: The Will to Truth*. London: Travistock.
- Sim**, Stuart (2002), *Seri Postmodern, Derrida dan Akhir Sejarah* (terj. Sigit Jatmiko). Yogyakarta: Jendela.
- Storey**, John (2003), *Teori Budaya dan Budaya Pop: Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Watson**, C. W. (2000), *Multiculturalism*. Buckingham Pulication: Open University Press.
- William**, Raymond (1963), *Culture and Society*. Harmondsworth: Penguin.
- (1965), *The Long Revolution*. Harmondsworth: Penguin.